

Polisi akan Panggil Pengelola McDonald's soal Kerumunan Promo BTS Meal

JAKARTA (IM) – Pihak Kepolisian akan memanggil Pengelola McDonald's terkait kerumunan di beberapa gerai di Jakarta saat promo BTS Meal.

"(Pengelola) akan diundang untuk diklarifikasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Rabu (9/6).

Pihak pengelola akan dimintai keterangan perihal promo hingga menghadirkan kerumunan yang terjadi di beberapa gerai tersebut.

Sebelumnya pihak kepolisian bekerja sama dengan Satpol PP telah melakukan penindakan terhadap gerai McDonald's yang menimbulkan kerumunan.

"Yang penting kita udah cegah dulu, preventif kita bubarkan dulu mereka kemudian tutup, segel dia punya Mcd. Aplikasinya juga suruh tutup, sambil berjalan kita menunggu kelanjutannya seperti apa," terang Yusri.

Yusri mengatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas. Satpol PP pun sudah memberikan teguran kepada pengelola McDonald's di beberapa lokasi yang terjadi kerumunan.

"Langkah-langkah yang kita lakukan memberikan imbauan ke masyarakat yang berkerumun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Buat surat teguran juga kepada pihak McDonald's. Kita minta pengelolanya di situ untuk menutup aplikasi. Kemudian supaya tidak terjadi kerumunan lagi kita tutup pintu masuk gerbang gerai tersebut. Sekarang ditangani Pol PP yang lakukan penyegelan," ujar Yusri.

Sebagai informasi, beberapa kerumunan di gerai McDonald's imbas promo BTS Meal memang terjadi siang hari tadi. Salah satunya terjadi di McDonald's Prapatan Duren, Ciputat,

Tangerang Selatan.

"Iya promonya itu tadi ada BTS Meal atau apa itu," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompok Jun Nurhaida driver ojol tersebut terjadi sejak pukul 11.00 WIB.

Nurhaida mengatakan ada ratusan sopir ojol yang diperkirakan di lokasi. Mendapatkan informasi tersebut, polisi bersama elemen pemerintah setempat lainnya segera mendatangi lokasi. Aplikasi promo tersebut di lokasi pun telah dihentikan oleh petugas hari ini.

"Anggota tadi udah di sana. Kita juga nggak tahu karena nggak ada pemberitahuan kan. Karena itu ada promo. Nah, anggota udah di sana 3 pilar sudah di sana dan sudah dibatasi ya. Untuk aplikasinya sudah dihentikan," katanya.

Selain itu, McDonald's di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus), telah ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan karena banyak ojek online yang berkerumun demi order BTS Meal yang diluncurkan pada Rabu (9/6).

Sebuah stiker penyegelan terpasang di depan pintu McD Stasiun Gambir ini. Stiker 'Ditutup Sementara' ini teregister 1213/BAP/PP/PI/2021 dan terhitung dari 9 sampai 10 Juni 2021.

"Jadi dengan ada kerumunan McD ini mengundang daripada driver online lain untuk membeli atau memesan dari rumah ini sehingga membentuk kerumunan. Nah kami tadi begitu mendengar laporan (ojol) dan kami cek, memang benar ternyata di sini ada keramaian. Sehingga kami di sini langsung bersama rekan dari Satpol PP dan rekan-rekan dari TNI, mengimbau mereka untuk tidak melakukan kerumunan," ujar Kapolsek Metro Gambir AKBP Kade Budiarta. ● lus



IDN/ANTARA

PENYEKATAN KENDARAAN TUJUAN PULAU MADURA

Petugas gabungan menghentikan kendaraan yang akan menuju Pulau Madura di akses masuk Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/6). Pihak kepolisian meminta pengemudi untuk kembali dan tidak bepergian ke Pulau Madura jika tidak mempunyai keperluan yang penting menyusul meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Bangkalan, Madura.

Empat Anggota Polres Raja Ampat Dipecat dengan Tidak Hormat

WAISAI (IM) – Empat personel Polres Raja Ampat, Polda Papua Barat, dipecat dengan tidak hormat karena terbukti melakukan pelanggaran.

Upacara pemberhentian dilaksanakan di lapangan Apel Polres Raja Ampat, Rabu (9/6), dihadiri keempat anggota tersebut.

Kapolres Raja Ampat AKBP Andre JW Manuputtu memimpin langsung upacara PTDH terhadap empat anggota tersebut. Keempat anggota Polri yang diberhentikan dari dinas Polri karena melakukan pelanggaran yang tidak mencerminkan perilaku anggota Polri dan sudah tidak dapat dibina lagi.

Keempat anggota tersebut adalah Brigadir Polisi Egar Gintang Faradini, Brigadir Polisi Arius Salossa, Brigadir Polisi Kepala Maurid Andi Randongkir, dan Brigadir Polisi Kepala Herry Permana.

Brigadir Polisi Egar Gintang Faradini, Bripta Maurid Andi Randongkir dan Brigadir Polisi Arius Salossa diberhentikan dari dinas Polri karena meninggalkan tugas di kepolisian secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.

Sedangkan Brigadir Polisi Kepala Herry Permana diberhentikan karena melanggar Pasal 11 huruf c peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri.

Dalam pasal tersebut

menjelaskan setiap anggota Polri wajib mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.

Kapolres Raja Ampat dalam amanatnya menegaskan, upacara PTDH yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan Kapolda Papua Barat tentang penajutuhan hukuman PTDH kepada setiap personel Polri yang dianggap sudah tidak layak menjadi anggota Polri.

Secara pribadi, menurut Kapolres, dirinya merasa prihatin dan sedih karena upacara PTDH ini merupakan upacara kali kedua di masa kepemimpinannya sebagai Kapolres Raja Ampat. Selaku Kapolres, dirinya juga berharap kedepannya tidak ada lagi personel Anggota Polres Raja Ampat yang melakukan pelanggaran apalagi sampai di PTDH.

Terkait dengan empat anggotanya yang diberhentikan itu, Kapolres mengatakan, sebagai pimpinan dia sudah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap anggotanya. Namun, hingga sampai keputusan ini ditetapkan keempat anggota tersebut tidak menunjukkan perubahan ke arah yang positif.

"Semoga momentum ini dapat dijadikan sebagai awal dari segala perubahan positif menuju Polri yang Presisi, dalam pelayanan publik kepada masyarakat," tandas Kapolres AKBP Andre JW Manuputtu. ● lus

IDN/ANTARA



KASUS PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kak Seto (tengah) didampingi Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan saat gelar kasus pencabulan anak di bawah umur di Polres Tegal Kota, Jawa Tengah, Rabu (9/6). Gelar kasus tersebut membahas tentang adanya kasus pencabulan oleh tiga orang pelaku yang masih di bawah umur kepada lima korban anak di bawah umur yang terungkap sepekan terakhir.

BUKA RAKERNIS STAF LOGISTIK

Kapolri Instruksikan Staf Logistik Agar Cepat Melakukan Penanganan di Wilayah Bencana

Kapolri meminta agar Staf Logistik tingkatkan pelayanan terhadap warga berkebutuhan khusus di setiap kantor polisi. Mereka diminta memberikan pelayanan prima kepada semua warga.

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran Staf Logistik (Slog) Polri agar bergerak cepat dalam melakukan penanganan di wilayah bencana alam.

Mantan Kabareskrim Polri ini meminta manajemen distribusi logistik di wilayah bencana alam perlu diatur dengan baik sehingga tidak terjadi penyumbatan penyaluran bantuan logistik.

Intruksi ini disampaikan

Listyo saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Logistik Polri di Gedung Rupasama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/6).

"Indonesia negara yang sering dilanda bencana. Sebab itu, diperlukan gerak cepat dari aparat kepolisian untuk mengerahkan bantuan dukungan logistik sarana dan prasarana kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam," ujar Listyo.

Selain itu, Listyo juga me-

minta agar Staf Logistik meningkatkan pelayanan terhadap warga berkebutuhan khusus di tiap kantor polisi. Menurutnya, hal ini sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh warga.

"Harapan kami memberikan pelayanan yang baik, buat saudara kita yang kebutuhan khusus untuk dibuatkan sarana dan prasarana agar pelayanan tidak ada perbedaan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Listyo memaparkan, ada lima tahap yang mesti dilakukan Staf Logistik dalam menjalankan tugas. Tahapan-tahapan tersebut, adalah pengembangan road map logistik, optimalisasi jejaring logistik, modernisasi mekanisme logistik, restrukturisasi organisasi, dan optimalisasi sumber daya.

"Logistik Polri merupakan salah satu unsur penting. Mengingat, personel kepoli-

sian membutuhkan dukungan logistik dalam menjalankan seluruh tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya.

Kapolri menegaskan agar Staf Logistik menjalin koordinasi yang baik dengan tim operasional di lapangan soal kebutuhan yang diperlukan. Dengan demikian, Staf Logistik dapat merencanakan kebutuhan petugas di lapangan dengan cermat.

Selain itu, Kapolri Listyo juga meminta Staf Logistik memikirkan dukungan penuh

kepada personel kepolisian yang bertugas di wilayah konflik dan berkecenderungan konflik.

"Anggota yang melaksanakan tugas di lapangan agar dilengkapi dan kualitas sesuai dengan kebutuhan, seperti anggota yang operasi di lapangan bisa melaksanakan tugas yang maksimal dengan medan yang berat dan ancaman jiwa anggota. Peralatan yang perlu pengamanan tinggi dijaga keamanannya seperti pengadaan senjata, peluru dan lainnya," katanya. ● lus

Guru Ngaji di Penjarangan Diduga Cabuli 5 Muridnya di Tempat Mengajar

JAKARTA (IM) - HS (58), guru ngaji di Penjarangan, Jakarta Utara, yang diduga mencabuli lima orang muridnya, ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara di Cengkareng, Jakarta Barat. HS sempat melarikan diri ke Pandeglang, Banten, setelah kasusnya mencuat.

"Pelaku melarikan diri dan akhirnya ditangkap tim Reskrim di daerah Cengkareng pada Senin (7/6)," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arif Darmawan, Rabu (9/6).

Guruh menuturkan, HS diduga telah mencabuli lima orang muridnya yang berusia 7-9 tahun di rumah yayasan tempatnya mengajar.

"Kejadian sekitar Maret 2021, siang hari. Kemudian TKP yayasan, tersangka HS, kemudian korban ada beberapa, yakni lima orang," tuturnya.

Kejadian bermula ketika salah satu orangtua korban mencari keberadaan putrinya yang belum sampai di rumah hingga pukul 22.00 WIB. Setelah orangtua mendapat informasi, rupanya korban sedang berada di rumah yayasan tersebut bersama HS. Setelah

ketemu, korban menceritakan hal yang dia alami kepada orangtuanya.

"Kemudian diberitahu bahwa korban ini saat itu berada dengan pelaku. Kemudian pada saat itu dicari dan ketemu, korban bercerita pada orangtuanya perlakuan yang dilakukan tersangka terhadap korban," ucap Guruh.

"Kemudian dari cerita korban, kalau korban ini tidak sendiri karena beberapa temannya dipelakukan sama dengan pelaku," tambahnya.

Orangtua korban kemudian langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Saat kasus ini mencuat, HS langsung melarikan diri ke Pandeglang hingga akhirnya ditangkap pada Senin malam.

Polisi mengamankan barang bukti berupa hasil visum korban dan beberapa pakaian yang dikenakan korban saat kejadian. HS diketahui telah memiliki istri dan lima orang anak yang tinggal di Serang, Banten. Atas perbuatannya, HS dijerat Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. ● lus

Bentrok Antar Dua Anggota Ormas di Bekasi Dipicu Masalah Utang

BEKASI (IM) - Polisi mengungkap pemicu bentrokan antar-organisasi masyarakat (ormas) di Narogong dan di depan Polres Metro Bekasi Kota pada Selasa (8/6) malam, gara-gara seorang warga tak membayar cicilan utang.

Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Alfian Nurzilal menjelaskan, perselisihan kedua ormas itu dipicu karena adanya utang. Seorang warga bernama meminjam uang ke koperasi perorangan yang bernaung di bawah bendera ormas tersebut.

"Saudari Ika (meminjam uang) kepada koperasi yang mungkin dimiliki perorangan atau dimiliki Pemuda Batak Bersatu (PBB)," kata Alfian kepada wartawan, Rabu (9/6).

Alfian menjelaskan, Ika meminjam uang sebesar Rp3,5 juta dengan perjanjian pembayaran secara diangsur dengan tenor tujuh kali cicilan. Adapun satu kali cicilan dibayarkan Ika sebesar Rp700.000.

Setelah proses cicilan berjalan, kata Alfian, Ika merasakan kesulitan membayar angsuran dan melapor ke ormas

lainnya. Akhirnya, bentrokan antar-ormas tak terhindarkan.

"Dia (Ika) minta bantuan dari ormas. Itu kejadiannya di Bekasi Timur. Kemudian terjadi percekocokan serta dorong-dorongan. Terjadi gesekan di situ," ucap Alfian.

Perselisihan kedua ormas itu tidak menemukan titik temu, bahkan sempat diwarnai penganiayaan. Salah satu ormas mencoba menyelesaikan persoalan di kantor Polisi. Namun, massa dari ormas lawan telah berkumpul di Polres Metro Bekasi Kota. Di sana kembali terjadi perselisihan antarkeduanya.

"Sebenarnya Gempa ke Polres ingin mediasi menyelesaikan masalah. PBB ke Polres mau melapor kejadian tersebut (penganiayaan). Ternyata di situ (Polres) sudah terjadi massa besar terdapat cekok, salah paham," kata Alfian.

Meski persoalan keduanya telah diselesaikan secara mediasi, namun Polres Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penganiayaan tersebut. ● lus



IDN/ANTARA

POLDA UNTKAP KASUS PENGGELAPAN KENDARAAN

Seorang petugas memasang kertas segel pada kendaraan yang menjadi barang bukti saat rilis kasus di Mapolda Kalbar, Rabu (9/6). Dit Reskrim Polda Kalbar menyita 12 mobil dan 12 motor serta menangkap delapan pelaku dari hasil mengungkap tujuh kasus penggelapan kendaraan rental dengan nilai kerugian miliaran rupiah.